BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena hubungan internasional saat ini tidak lagi hanya membahas sebatas hubungan kerjasama bilateral ataupun multilateral. Permasalahan isu – isu yang dikaji juga tidak hanya berfokus kepada pemerintahan di suatu negara, namun melibatkan organisasi – organisasi non pemerintah. Kerjasama yang dilakukan juga tidak hanya antar negara saja, namun pelibatan organisasi internasional dan negara juga dapat dilakukan apabila memiliki kepentingan yang sama atau dapat mampu bekerjasama dalam mencapai tujuan tersebut. Seperti permasalahan perang, keamanan yang termasuk dalam isu hubungan internasional *high politics,* tidak hanya melibatkan peran negara semata, namun melibatkan organisasi non pemerintah (Shanur, 2019). Hal ini membuktikan bahwa perspektif dalam hubungan internasional tidak hanya membahas tentang kekuasaan, kepentingan atau kekuatan negara namun dengan seiring waktu muncul kajian baru yang membahas aktor non negara sebagai isu global. Salah satunya adalah isu lingkungan yang kini tengah hangat diperbicangkan dalam ilmu hubungan internasional. Isu lingkungan juga menjadi perhatian publik dan masyarakat global, baik itu dari para peneliti, pemerintah ataupun masyarakat global. Hal ini menandakan bahwa isu *low politics* dapat menjadi isu sentral dalam dunia perpolitikan masa kini.

Disintegrasi lingkungan terjadi akibat penggunaan sumberdaya alam secara berlebihan oleh manusia dan aktivitas yang bersifat merusak sumber daya alam. Hal itu mengakibatkan degredasi lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak

pada pemanasan global yang diikuti oleh perubahan iklim atau *climate change*. Hal ini menjadi dasar mengapa isu lingkungan menjadi isu penting dalam permasalahan global. Penyelamatan keanekaragaman hayati serta perlindungan fungsi ekosistemnya telah menjadi kesepakatan dunia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB dan menetapkannya sebagai salah satu misi *Sustainable Development Goals* atau SDGs (Khairina, 2020). Tujuan misi ini adalah untuk melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya alam di darat mapun di lautan secara berkelanjutan atau *sustainable* dengan memperhatikan kehidupan saat ini, besok, dan yang akan datang, dan juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Soerjani menjelaskan *sutainable development goals* atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mendorong untuk perbaikan kesejahteraan sosial – ekonomi, pelestarian, sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan keanekaragaman hayati lainnya untuk jangka waktu yang panjang (Larasti, 2019). Konsep ini tertuang dalam strategi yang disebut "*Caring for the Earth: The Strategy for Sustainable Living".* Dalam *Caring for the Earth* (CE) (1991) *sustainable development* digariskan sebagai berikut :

> "*improving the quality of human life while living within the carrying capacity of supporting ecosystem. A sustainable economy is the product of sustainable development. It maintains its natural resources base, it can continue to develop by adopting and through improvement in knowledge, organization, technical efficiency and wisdom."*

Lebih lanjut lagi Larasati (2019) menerangkan, pembangunan berkelanjutan memiliki prinsip untuk meningkatkan kualitas hidup manusia sekaligus hidup dalam daya dukung ekosistem pendukungnya. Ekonomi berkelanjutan juga merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari pembangunan berkelanjutan dimana hal ini harus mempertahankan basis sumber daya alamnya dan harus terus berkembang dengan mengadopsi melalui peningkatan pengetahuan, organisasi, efisiensi dan kebijaksanaan.

Permasalahan lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Lingkungan juga dijadikan basis pengembangan pembangunan yang diterapkan hampir di keselurahan industri, dan pariwisata merupakan salah satu industrinya. Industri ini berdasarkan kegiatan pemeliharaan alam dalam hal ini adalah konservasi yang *sustainable* atau berkelanjutan. Menurut Soemarwoto (2001), sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat peka terhadap lingkungan. Keruskan lingkungan dalam pariwisata yang terjadi seperti *mass tourism*, pencemaran limbah domestik, destinasi wisata yang kumuh, aksesbilitas, dan lainnya berdampak akan mengurangi jumlah wisatawan yang berkunjung dan tentunya tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu Soemarwoto menyebutkan juga bahwa pengembangan pariwisata harus menjaga kualitas lingkungan.

Konsep pembangunan pariwsata berkelanjutan (*sustainable tourism*) hadir sebagai alternatif dalam mengatasi dampak negatif dari kegiatan pariwisata. Konsep ini merupakan hasil dari kajian oleh para aktivis lingkungan, peneliti atau ilmuwan, praktisi lingkungan dan perumus kebijakan. Konsep ini juga ditekankan untuk pengembangan pariwisata yang memberikan keuntungan secara positif dari

ekonomi, sosial tanpa merusak lingkungan serta jika memungkinkan dapat dipulihkan kembali kepada kondisi lingkungan yang sudah mengalami kerusakan (Janusz & Badjor, 2013).

Berdasarkan deklarasi yang dicanangkan oleh *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) pada tahun 1996 berisikan :

> *"tourism which leads to management of all areas, in such a way, that the economic, social and environmental needs are being fulfilled with the cultural integration, ecological processes, biodiversity and supporting the development of societies."*

Maka dari itu, pariwisata yang dikelola harus memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial serta lingkungan melalui penguatan budaya, proses ekologis dan keanekaragaman hayati dan pengembangan sumber daya manusia. Fennel (2003) menyatakan juga bahwa apabila melihat dari konsep pembangunan berkelanjutan, maka konsep pariwisata berkelanjutan harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan pengunjung saat ini dan masa yang akan datang.

Pariwisata berkelanjutan mencakup tiga aspek/dimensi yang saling berkaitan yaitu: ekonomi, sosial dan lingkungan. Setiap dimensi, memiliki tekanan yang harus terpenuhi. Sebagai contoh, dalam dimensi ekonomi harus diseimbangkan dengan tekanan pada dimensi sosial dan lingkungan. Ketiga dimensi tersebut harus saling berintegrasi tanpa mengorbankan salah satu dimensi. Sebagai contoh, dalam pemenuhan tekanan dimensi ekonomi, tidak boleh mengorbankan dimensi lingkungan (Arida, 2016).

Salah satu bentuk pariwisata berkelanjutan adalah ekowisata atau *ecotourism*, yaitu pariwisata yang berorientasi pada konsep pembangunan berkelanjtan dengan penekanan pada konservasi lingkungan. Isu keberlanjutan ini sudah dibahas dalam *Earth Summit* di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dimana konsep berkelanjutan mencari titik tengah antara pemanfaatam sumber daya alam dan pembangunan di era modern yang cenderung mengeksploitasi lingkungan. Pradati (2017) menerangkan, bahwa Indonesia sudah mengadopsi dan menerapkan konsep ekowisata pada level kebijakan dan praktik selama lebih dari satu dekade. Sementara Boo (1991) menjelaskan ekowisata merupakan wisata alam yang berbasis pada upaya konservasi dengan cara mengedukasi lingkungan baik itu kepada turis mapun kepada wisatawan domestik.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai lebih dari 17.000 pulau, serta memiliki keanekaragaman hayati dan ekosistem yang beragam dengan endemisitas yang cukup tinggi menjadikan Indonesia sebagai pusat dari keanekaragaman flora dan fauna dunia (Dpr.go.id, 2015). Keunikan dan keragaman lingkungan alam yang Indonesia miliki ini merupakan potensi nilai daya jual yang sangat tinggi. Maka dari itu, kelestarian sumberdaya dan keanekaragaman hayati di dalamnya perlu dijaga, dirawat, dan dipertahankan sebaik mungkin. Hal ini juga berdampak positif terhadap pembangunan kelautan sebagai *multiplier effect* dimana keberlanjutannya tidak dapat dipisahkan dari usaha pariwisata terhadap lingkungan tersebut.

Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia didukung dengan adanya peraturan dan regulasi berdasarkan Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi dan

Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Provinsi, Keputusan Gubernur, sampai ke tingkat Kabupaten dan Kota. Regulasi tersebut menuliskan panduan serta prinsip – prinsip berkelanjutan yang harus diikuti secara eksplisit dan implisit. Peraturan perundangan yang menjelaskan pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah UU Lingkungan Hidup No 32 tahun 2009 dan UU Pariwisata No 10 tahun 2009, UU Cagar Budaya No 11 tahun 2010, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 dan turunannya.

Indonesia juga sebagai negara bahari yang kaya akan sumberdaya laut yang melimpah, keanekaragaman hayati lautnya menjadi sumber penghidupan masyarakat Indonesia. Sumber daya laut ini apabila dikelola secara berkelanjutan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana pemanfaatan sumber daya laut ini akan berhasil apabila kepentingan ekonomi dan kelestarian sumberdaya laut seimbang. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Indonesia melakukan sebuah upaya besar dalam menjaga kelestarian sumber daya dan keanekaragaman hayati laut dengan cara melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Sampai tahun 2020 tercatat Kawasan Konservasi Perairan Indonesia yang sudah dikembangkan sekitar 23,42 juta hektar dengan ruang lingkup 7% dari total luas perairan Indonesia.

Salah satu daerah yang mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Kepulauan Riau adalah Desa Mapur. Desa Mapur berlokasi di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan. Desa Mapur merupakan pulau terluar dari kecamatan Kepulauan Bintan Timur dan terletak di wilayah perbatasan Indonesia, dimana sebelah Utara berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, di bagian Timur

berbatasan langsung dengan Selat Karimata, pada bagian Barat berbatasan dengan Kelong, sementara di bagian Selatan berbatasan dengan desa Numbing.

Desa Mapur merupakan salah satu Kawasan Konservasi Bintan yang lebih dari setengahnya merupaakan perairan. Pariwisata yang ada di Desa Mapur didasarkan pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Potensi pariwisata bahari yang dimiliki Desa Mapur itu sendiri adalah keanekaragaman hayati laut yang melimpah seperti terumbu karang, biota laut penyu, kuda laut, kima, *mangrove* yang merupakan keunggulan yang dimiliki oleh Desa Mapur. Selain itu, pantai belakang atau songseng yang berlokasi di Desa Mapur juga masih sangat asli dan autentik. Keunikan budaya dan makanan lokal nya juga menjadi dayatarik wisatawan mancanegara ataupun domestik. Sebelum pandemi, Bapak Jamal menyatakan wisatawan yang datang bisa mencapai 300 – 500 perhari. Wisatawan datang karena tertarik dengan keindahan alam bawah lautnya dan beberapa wisatawan melakukan *snorkling* dan *scuba diving* untuk melihat terumbu karang yang ada di pulau Mapur. Selain itu, wisatawan juga dilibatkan dalam pengupayaan konservasi terumbu karang, konservasi penyu, dan pelesatarian taman kima.

Dalam keberhasilan untuk mencapai pariwisata yang berkelanjutan, masih banyak ditemukan permasalahan yang terjadi di Desa Mapur. Dalam permasalahan lingkungan, masalah sampah, limbah domestik, masih menjadi isu utama di pulau tersebut. Dengan potensi yang ada, kesejahteraan masayrakat lokalnya pun masih tergolong rendah. Dalam aspek sosial, wisatawan ataupun masyarakat lokal belum sepenuhnya peduli terhadap lingkungan.

Kelompok masyarakat merupakan aktor yang memiliki peran penting dalam pariwisata berkelanjutan dimana keberhasilanya membutuhkan partisipasi dari semua pemangku kepentingan. Di Desa Mapur sendiri, ada beberapa kelompok masyarakat yang terlibat, seperti Kelompok Mutiara Mapur, LPSTK Perisai Mapur, dan POKMASWAS. Keterlibatan kelompok masyarakat ini dalam pariwisata mereka melakukan upaya konservasi penyu, kima dan terumbu karang. Namun, kendala yang mereka hadapi adalah kurangnya fasilitas yang memadai sehingga dibutuhkan lebih bantuan dari pemangku kepentingan yang lain. Selain itu, *stakeholders* yang terlibat ada dari LSM, pemerintah, pelaku bisnis, dsb.

Kawasan Konservasi Bintan yang telah ditetapkan ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membangun Bintan secara berkelanjutan. Mapur merupakan salah satu Kawasan Konservasi yang memiliki potensi pariwisata untuk tingkat level nasional maupun internasional. Apabila potensi yang dimiliki ini dapat dikelola dengan baik, tentunya akan menguntungkan untuk semua pihak baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Namun masih banyak ditemukanya masalah masalah dalam mewujudkan pencapaian tersebut. Kelompok masyarakat, LSM, pemerintah daerah maupun pelaku bisnis merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan pencapaian pariwsiata yang berkelanjutan.

Berdasarkan gambaran yang telah peneliti paparkan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi bagaimana peran para pemangku kepentingan dalam hal ini adalah *civil society* dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di desa Mapur, Kepulauan Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Desa Mapur sebagai salah satu Kawasan Konservasi Bintan memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan. Dalam pengupayaan pariwisata yang berkelanjutan di desa tersebut, tentunya pelibatan antar *stakeholders* menjadi faktor penting sebagai kunci keberhasilan konsep tersebut. Masyarakat sipil memiliki tanggung jawab masing – masing untuk mengelola pariwisata yang peduli lingkungan dan tentunya juga bisa untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada dan kesejahteraan masyarakat lokal meningkat. Dukungan tersebut membutuhkan bantuan dari pemerintah begitupun sebaliknya. Untuk melihat sejauh apa peran masyarakat sipil yang sudah lakukan di desa Mapur, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Masyarakat sipil atau *civil society* apa saja yang hadir di pulau Mapur?
2. Peran apa saja yang dilakukan *civil society* dalam mendukung konsep pariwisata yang berkelanjutan di desa Mapur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang peneliti ingin capai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisa keterlibatan *civil society* di desa Mapur sehingga pariwisata berkelanjutan dapat terwujud.
2. Menganalisa apakah *civil society* yang terlibat sudah memenuhi aspek berkelanjutan (lingkungan, ekonomi dan sosial) terhadap pariwisata di Mapur dan sudah sejauh mana upaya mereka dalam mendukung konsep pariwisata berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Untuk menambahkan ilmu dan pengetahuan pembaca mengenai bagaimana *civil society* berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Desa Mapur.

b. Untuk meningkatkan kesadaran pentingnya mengetaui permasalahan lingkungan yang berdampak terhadap pariwisata.

c. Untuk menambah wawasan terkait *sustainable tourism*, SDGs, serta Kawasan Konservasi Perairan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Peneltian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan penulis lebih dalam lagi, selain itu menjadi motivasi penulis untuk terus berkembang dan mencari tau hal hal baru dalam dunia global, dan bagaimana Ilmu Hubungan Internasional dapat diterapkan dalam menghadapi masalah atau isu global tersebut.

b. Bagi Pemerintah/instansi terkait

Dalam instansi pemerintahan, dibuthkan kajian atau bahan yang dapat menjadi referensi pemerintah baik itu dalam mengatasi permasalahan atau untuk menjadi bahan bacaan. Harapan penulis, penelitian ini dapat membantu pemerintah terkhusus membahas permasalahan bagaimana *civil society* berperan dalam industri pariwisata yang berkelanjutan.

c. Bagi Masyarakat.

Harpan penulis penelitian ini dapat dan mampu untuk menambah pengetahuan masyarakat dan tentunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sehingga terkhusus di desa Mapur, Kawasan Konservasinya dapat terjaga dan terlindungi dengan baik sehingga pariwisata berkelanjutan dapat diterapkan.

d. Bagi Peneliti Lain

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain dan bisa dijadikan bahan sebagai informasi selanjutnya dalam melakukan penelitian.